



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)

ISSN: 2502-8103 (Print)ISSN: 2477-8524(Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



Kontribusi disinformasi pemerintah tentang pencegahan penyebaran covid-19 terhadap kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan

Chontina Siahaan^{*)}

Dosen Fisipol Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Des 30th, 2021

Revised Feb 24th, 2022

Accepted Mar 22nd, 2022

Keyword:

Disinformasi pemerintah
Kepatuhan masyarakat
Penyebaran Covid-19
Protokol kesehatan

ABSTRACT

Informasi yang disampaikan oleh pemerintah tentang pencegahan penyebaran virus corona-19, ada berbagai jenis, antara lain, Gerakan 5 M, pemberlakuan WFH dan WFO, PSBB, PPKM, dan lain-lain. Di antara informasi yang disampaikan oleh pemerintah, terdapat disinformasi yang berdampak kepada kepatuhan menjalankan protokol Kesehatan. Misalnya pemerintah mengatakan bahwa hanya yang sakitlah yang menggunakan masker. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh disinformasi dari pemerintah tentang pencegahan penyebaran covid-19 terhadap tingkat kepatuhan masyarakat menjalankan protokol Kesehatan. Hipotesis teori penelitian ini, informasi yang sudah disampaikan tidak dapat ditarik Kembali (irreversible) sedangkan hipotesis penelitian adalah semakin tinggi tingkat ketidakpatuhan masyarakat. Populasi penelitian ini adalah masyarakat Jakarta Timur. Metode penelitian adalah survey dengan menyebarkan questioner melalui google form. Hasil penelitian diolah dengan statistic SPSS dengan hasil terdapat pengaruh disinformasi pemerintah terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protocol Kesehatan. Rekomendasi dari penelitian ini agar pemerintah konsisten dalam menyampaikan informasi yang benar bukan disinformasi karena komunikasi bersifat irreversible yang berdampak kepada kepatuhan masyarakat dalam menjalankan aturan dan kebijakan dari pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Covid-19.



© 2022 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Chontina Siahaan,
Dosen Fisipol Universitas Kristen Indonesia
Email: Chontina.siahaan@uki.ac.id

Pendahuluan

Memperoleh Informasi yang benar dan objektif seputar Covid-19 sangat penting bagi masyarakat baik tentang penularan, pencegahan, pengobatan, tambahan suplemen, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah Covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia demikian juga di Indonesia. Pasca lebaran, penularan Covid-19 merebak sangat tinggi dan sangat berbahaya dengan varian baru yaitu virus delta yang lebih berbahaya dari virus alpha. Dalam era media digitall, masyarakat banyak mencari informasi dari media sosial. Untuk memperoleh informasi tentang kesehatan, di Amerika sekitar 90% orang dewasa yang berusia di antara 50 sd 75 tahun mencari informasi dari media Sosial (Nelakurthi & He, 2020). Di Indonesia, pengguna media Sosial lebih dari 160, 4 Juta jiwa. Jadi, informasi seputar Covid-19 sangat cepat bisa diperoleh melalui media sosial.(Kusumastuti et al., 2021).

Dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19, dikeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan, oleh pemerintah, seperti dari presiden, Menteri Kesehatan, Gubernur DKI, Kepala Daerah. Dalam menjalankan peraturan dan kebijakan ini, diperlukan satu pemahaman yang sama di antara pemerintah dan masyarakat sehingga informasi yang disampaikan pemerintah, haruslah jelas dan benar adanya. Informasi tidak boleh salah tafsir dan ambigu apalagi disinformasi. Penyampaian informasi yang salah, bisa menimbulkan ketidakpatuhan di masyarakat. Misalnya, Menteri Kesehatan, dokter Terawan mengatakan bahwa hanya orang yang sakit yang perlu menggunakan masker sedangkan yang sehat, tidak perlu memakai masker. Pernyataan dokter Terawan ini adalah disinformasi atau informasi yang salah yang disampaikan melalui media televisi. Akibatnya, selain Menteri Kesehatan dibully masyarakat, dia juga mengundurkan diri.

Menteri Kesehatan adalah komunikator yang merupakan public figur yang harus kompeten dan kredibel dalam menyampaikan informasi terkait Covid 19 karena Informasi adalah komoditas (Armstrong et al., 2014). Jadi, pemerintah sangat urgent memperhatikan komunikasi karena jika salah, bisa dijadikan komoditas untuk hal-hal negative karena di era media digital, orang merasa berhak mengeluarkan kata apa saja melalui akun media sosial (Mauludi, 2019). Mungkin saja karena disinformasi tentang pencegahan penularan Covid yang salah, maka Menteri Kesehatan, dr. Terawan tidak dipake lagi sebagai Menteri di era Jokowi. Disinformasi dari Menteri Kesehatan ini, jelas membuat masyarakat ambigu karena masyarakat memahami dan melakukan apa yang didengar dan ditonton melalui media televisi. Bisa juga dalam hal ini pemerintah dikatakan gagap menghadapi Covid-19 (Fajar, 2020), Demikian juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan meskipun berkelekar bahwa Covid-19 tidak mempan terhadap orang Indonesia karena kebiasaan mengkonsumsi nasi kucing (Priatmojo, 2020)

Selain mengatakan hanya orang sakit yang menggunakan masker, ternyata Menteri Kesehatan, Terawan Agus Purwanto juga mengatakan agar bersantai dan menghindari kerja lembur untuk menghindari tertular penyakit dan secara keliru mengklaim bahwa flu memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi dibanding Corona, Membanjirnya informasi dari sumber tanpa filterisasi, ketidakkonsistenan komunikator dalam berucap, merupakan disinformasi yang membingungkan masyarakat. (Prasetyo, 2017).

Pasca lebaran, ternyata penyebaran virus corona versi baru yaitu jenis virus delta dari India, sudah sampai di Indonesia dan penyebarannya sangat cepat. Pemberitaan di Kompas TV bahwa tingkat penyebaran virus corona di DKI naik di atas 300% di mana semua RS penuh dan Wisma Atlet sudah tidak mampu menampung penderita Covid-19. Demikian juga orang yang meninggal meningkat terus. Jakarta termasuk yang paling banyak terpapar Covid-19. Sampai saat ini grafik penyebaran covid-19 masih tinggi.

Pemerintah sudah melaksanakan suntik vaksin kepada sebagian besar masyarakat, akan tetapi dampaknya belum signifikan terhadap pengurangan yang terpapar dan yang meninggal akibat Covid-19 khususnya setelah awal bulan Juni 2021. Agak membingungkan juga karena pemerintah sudah berupaya membuat berbagai kebijakan dalam mengatasi penyebaran covid-19 akan tetapi dampaknya belum begitu berarti. Timbul pertanyaan mengapa demikian? Bahkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menerapkan aturan agar yang WFO hanya boleh 50% yang masuk dan harus digilir dengan pengertian, orang yang masuk kantor jangan yang itu-itu saja. Lansia dan anak-anak dilarang ke luar rumah lebih baik tinggal di rumah saja karena sangat rentan kena penularan Covid-19 dan mulai tanggal 3 s.d. 20 Juli diberlakukan PPKM.

Penanganan Covid-19 termasuk bagus dilakukan di Jakarta karena ada step-step yang dilakukan sebelum terkena Covid seperti melakukan rapid test, swab antigen, PCR, dan lain-lain (Utami et al., 2020). Akan tetapi nyatanya, bukan berkurang yang terpapar virus Corona-19 tetapi makin hari makin banyak apalagi dengan jenis virus yang baru. Menjadi pertanyaan mengapa demikian? Apakah masyarakat tidak mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah disinformasi dari pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol Kesehatan?

Penelitian tentang disinformasi tentang pencegahan Covid-19 sudah pernah dilakukan oleh Oemar Madri Bafadhai dan Anang Dwi Santoso dari Universitas Sriwijaya yang memetakan bentuk-bentuk disinformasi di bidang politik, Kesehatan luar negeri, bisnis dan kriminalitas. Temuannya adalah Facebook dan whatsapp adalah media yang paling sering digunakan untuk membagikan disinformasi. (Bafadhai & Santoso, 2020)

Di samping itu penelitian Nursatyo dan Humaini dari Universitas Nasional menemukan bahwa wacana yang dikonstruksi pemerintah dalam upaya menangani dampak pandemic Covid-19 adalah selalu ada jalan tengah antara kepentingan kesehatan dan kepentingan ekonomi. Masyarakat harus tetap produktif bekerja dengan tetap menjaga kesehatan. Wacana public yang turut berkembang adalah bahwa Covid-19 merupakan bentuk konspirasi global yang bertujuan untuk mengacaukan perekonomian dunia (Sabilah et al., 2021). Penelitian Jessica Moudy dan Rizma Adilia Syakurah meneliti Pengetahuan Terkait usaha pencegahan Coronavirus Disease (Covid-19) di Indonesia dengan hasil penelitian bahwa terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan dengan sikap ($p=0,000$) dan pengetahuan dan tindakan individu ($p=0,000$) (Higelia

Journal of Public Health Research and Development. Penelitian Anton Surahmat, Susanne Dida dan Feliza Jubair (2021) tentang Analisa wacana Strategi Komunikasi Krisis Pemerintah Menangani Covid-19 dengan kesimpulan bahwa Covid-19 tidak semenakutkan apa yang diberitakan menjadi gagasan utama yang muncul pada pernyataan Presiden Jokowi dan jubi dr. Achmad Yurianto. Pemerintah justru gagap dan tidak konsisten dalam mengomunikasikan kebijakannya terkait penanganan Covid-19 selama prakrisis dan krisis sehingga menimbulkan keresahan baik berupa misinformasi maupun disinformasi di masyarakat.

Penelitian saya adalah untuk melihat pengaruh disinformasi pemerintah tentang pencegahan covid-19 terhadap tingkat kepatuhan masyarakat Jakarta dalam menjalankan protocol Kesehatan yang belum ada diteliti sehingga penelitian ini merupakan sesuatu yang baru. Kebaruan informasi ini adalah kekeliruan pemerintah memberikan informasi yang salah dalam penanganan Covid-19 yang seharusnya memberikan informasi yang benar kepada masyarakat yang dikaitkan kepada kepatuhan masyarakat

Pengertian disinformasi diambil dari pendapat Tenescu 2014 yang dikutip Oemar sebagai berikut: disinformasi merupakan distribusi atau diseminasi informasi bohong palsu, keliru, atau menyimpang secara sengaja yang bertujuan untuk menyesatkan, menipu atau membingungkan pihak penerima. Ada beberapa bentuk disinformasi yang disampaikan pemerintah misalnya: 1) Menteri Kesehatan mengatakan bahwa hanya orang sakit yang perlu menggunakan masker sedangkan orang sehat tidak perlu memakai masker (lihat Surat Edaran Nomor HK.02.02/i/385/2020 Tentang penggunaan Masker dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) .2) Obat Klorokuin bukan obat corona (<https://www.youtube.com/watch?v=4BwpEYtUYzo0>) 3) Pemerintah tidak akan mengumumkan lagi kasus positif Corona-19 meskipun maksudnya ODP dan PDP (https://www.kominfo.go.id/content/detail/26588/disinformasi-pemerintah-takkan-umumkan-lagi-kasus-positif-covid-19/0/laporan_isu_hoaks) 4) Pemerintah mengatakan bersantai kerja dan menghindarkan lembur. (https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_misinformation_by_governments&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search) 5) Sertifikat Vaksin sebagai pengganti tes negative Covid-19. (<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5498258/pro-dan-kontra-sertifikat-vaksinasi-covid-19-jadi-syarat-perjalanan>) 6) Informasi seputar pemulasaran jenazah. (Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Untuk Pemulasaran jenazah, butir 3 dikatakan antara lain dalam ketentuan pemakaman jenazah Covid-19, penguburan dapat dilakukan di pemakaman umum.

Kemudian disinformasi seputar pemulasaran jenazah yang meninggal akibat covid. Ada yang dimakamkan di tempat yang khusus dan tidak boleh dihadiri oleh keluarga, tetapi ada juga yang dimakamkan di pemakaman umum. Ketika masyarakat menolak memakamkan jenazah yang meninggal akibat Covid-19, di pemakaman umum, pemerintah mengatakan bahwa mayat yang sudah meninggal tidak dapat lagi menularkan virus karena induknya sudah meninggal.

Ada beberapa contoh kasus di mana pemerintah tidak konsisten melaksanakan peraturan yang dikeluarkan. Misalnya, "dilarang mudik" akan tetapi tetap saja banyak yang lolos pulang mudik dengan berbagai alasan dan cara yang dilakukan oleh masyarakat. Penumpang di Trans Jakarta, hanya yang duduk saja yang diselangsingi sedang yang berdiri, sampai himpit-himpitan tetap tidak ada tindakan karena supir trans Jakarta tetap tidak membatasi penumpang yang berdiri..

Di samping itu, himbauan untuk tidak berkerumun atau menjauhi kerumunan, tidak berlaku di beberapa tempat di pasar-pasar tradisional karena tidak ada pengawasan. Jadi, disinformasi dari pejabat itulah yang membuat masyarakat tidak patuh. Untuk menyelesaikan penelitian ini, digunakan teori kepatuhan dari Tyler yang mengatakan sebagai berikut:

Teori Kepatuhan (Compliance Theory) dari Tyler mengatakan bahwa kepatuhan yang dinilai berkaitan dengan ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, dan undang-undang yang berlaku. Ada dua bentuk kepatuhan yaitu kepatuhan instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Sedangkan perspektif normative berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Tentang etika dan kejujuran, pernah ditulis U.S. News dan CNN yang mengatakan bahwa tingkat perilaku etis menurun khususnya di kalangan para pejabat yang memiliki tanggung jawab publik ataupun pribadi (Johannesen, 1996:8), Lebih jauh filosof S, Jack Odell mengatakan bahwa masyarakat tanpa etika adalah masyarakat yang menjelang kehancuran (1996: 6). Oleh karena itu, ketika ada orang yang mengomunikasikan informasi seputar Covid-19, etikanya informasi yang disampaikan harus konsisten dan tidak membuat masyarakat bingung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bentuk disinformasi pemerintah yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol Kesehatan dengan membuktikan apakah variable disinformasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat. Sedangkan manfaat penelitian ini

adalah untuk mengedukasi masyarakat lebih melek literasi media sehingga meski pemerintah menyampaikan disinformasi, masyarakat cerdas dalam menerima informasi dan mematuhi.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif karena akan menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Penelitian yang akan membuktikan apakah variabel X berpengaruh terhadap Variabel Y. (Variabel X adalah disinformasi dari pemerintah sedangkan variabel Y adalah kepatuhan masyarakat menjalani protokol Kesehatan. (Kriyantono, 2017). Teori yang dipergunakan adalah teori Kepatuhan (Compliance Theory) dari Tyler tentang perspektif kepatuhan kepada hukum yang meliputi perspektif instrumental dan perspektif normatif. Populasi penelitian ini adalah masyarakat Jakarta yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat mulai dari pedagang, pekerja baik pegawai negeri maupun swasta, ibu rumah tangga, remaja, mahasiswa dan orang tua sebanyak 185 orang. Cara mendapat data dengan menyebarkan pertanyaan melalui google form (Silalalhi, 2009:291) yang dikembalikan dan dianalisis. Jumlah responden diacak sesuai dengan persentasi masyarakat yang tinggal di Jakarta. Waktu pendistribusian questioner dengan pengembalian kuesioner selama 1 minggu terhitung mulai tanggal 19 s.d. 27 Juni 2021. Hasilnya dianalisis dengan statistik SPSS.

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Data

Responden penelitian ini mencakup enam karakteristik atau latarbelakang yakni: jenis kelamin, usia, pendidikan, status, pekerjaan dan penghasilan. Seluruh responden yang terjaring melalui google form ada sebanyak 180 orang. Setelah pembersihan data diperoleh 123 responden final setelah tidak mengikutkan data-data yang tidak lengkap informasinya. Secara selengkapnya deskripsi data penelitian disampaikan seperti pada table 1-6 berikut:

Tabel 1. Hasil Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Laki-laki	47	38,2
Perempuan	76	61,8
Total	123	100

Tabel 2. Hasil Responden Menurut Usia

Usia	Jumlah	%
15-17 tahun	4	3,3
17-21 tahun	67	54,5
22-30 tahun	25	20,3
di atas 30 tahun	27	22
Total	123	100

Tabel 3. Hasil Responden Menurut Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	%
SMA/K Sederajat	72	58,5
S1	40	32,5
S2	6	4,9
S3	0	0
Lainnya	5	4,1

Tabel 4. Hasil Responden Menurut Status

Status	Jumlah	%
Menikah	97	78,9
Belum Menikah	26	21,1
Total	123	100

Tabel 5. Hasil Responden Menurut Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	%
Pelajar/Mahasiswa	84	68,3
Ibu Rumah Tangga	4	3,3
Pegawai Negeri	6	4,9
Pegawai Swasta	22	17,9
Lainnya	7	5,7

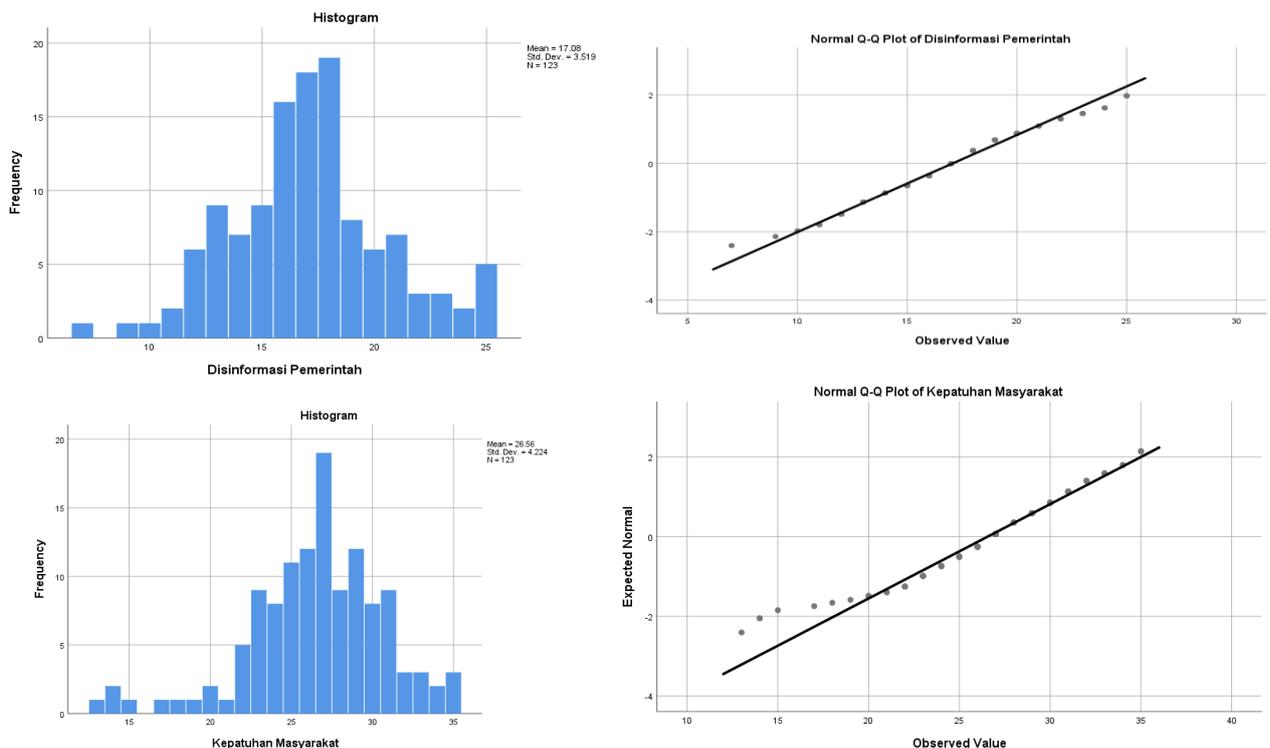
Tabel 6. Hasil Responden Menurut Penghasilan

Pekerjaan	Jumlah	%
< Rp 5.000.000	91	74
Rp 5.000.000-Rp10.000.000	23	18,7
> Rp 10.000.000,-	9	7,3
Total	123	100

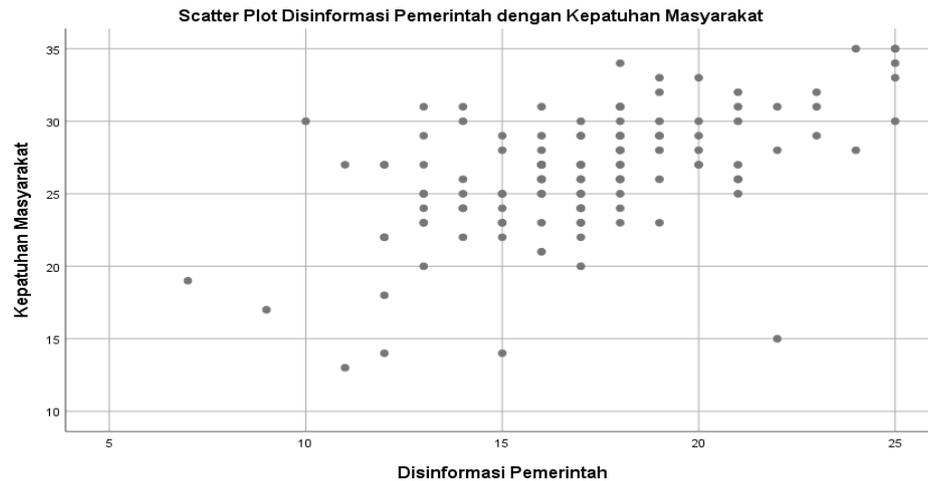
Dari Table di atas menginformasikan bahwa secara jenis kelamin mayoritas responden adalah perempuan (76; 61,8%) dan sisanya (47; 38,2%) adalah laki-laki. Secara usia mayoritas responden adalah berusia 17-21 tahun, yang berarti anak sebaya SMA/SMK dan kuliah. Secara status, mayoritas responden sudah menikah (97; 78,9%). Sisanya ada (26; 21,1%) yang belum menikah. Pada tingkat pendidikan mayoritas adalah SMA/SMK Sederajat yaitu (72; 58,5%) diikuti yang kedua pendidikan S1 (40; 32,5%). Secara pekerjaan, responden didominasi yang pelajar/mahasiswa (84; 68,3%), kemudian pegawai swasta (22; 17,9%). Sisanya ibu rumah tangga, pegawai negeri dan lainnya ada sebanyak (17; 13,9%). Adapun secara penghasilan, responden didominasi yang berpenghasilan di bawah Rp. 5.000.000,- per bulan (91; 74%). Selanjutnya diikuti responden yang berpenghasilan Rp. 5.000.000,- sampai Rp. 10.000.000,- perbulan (23; 18,7%). Responden berpenghasilan di atas sepuluh juta rupiah perbulan hanya ada sebanyak 9 orang (7,3%).

Analisis Korelasi

Data Disinformasi Pemerintah berdistribusi normal atau mendekati normal. Hal tersebut dapat dilihat dari histogram dan grafik P-P Plot yang dihasilkan menggunakan SPSS IBM 21. Pada diagram P-P Plot data-data menempati atau berkumpul pada satu garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas, hal itu menunjukkan bahwa data itu berdistribusi normal.

**Gambar 1.** Analisis korelasi

Dari syarat normalitas tersebut diperiksa juga kelinieritasannya. Dan dengan diagram scatter plot berikut dapat dilihat bahwa hubungan kedua variabel mendekati hubungan linier.



Dengan terpenuhinya syarat parametrik analisis data, maka dapat dilakukan mengkorelasikan skor total item-item disinformasi (yaitu butir nomor 5, 8, 10, 12, 15, 17) dan skor total item-item kepatuhan masyarakat (yaitu butir nomor 4, 7, 9, 11, 14, 16). Hasil analisis korelasi menghasilkan koefisien korelasi seperti pada tabel berikut:

Correlations			
		Disinformasi Pemerintah	Kepatuhan Masyarakat
Disinformasi Pemerintah	Pearson Correlation	1	.489**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	123	123
Kepatuhan Masyarakat	Pearson Correlation	.489**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	123	123

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari tabel correlations di atas didapat koefisien korelasi dari variabel Disinformasi Pemerintah dan Kepatuhan Masyarakat ada sebesar 0,489, atau ditulis $r_{XY} = 0,49$. Dalam hal ini nilai Sig. (0,000) lebih kecil dari nilai signifikansi alpha ($\alpha = 0,05$). Berarti terdapat hubungan signifikan antara Disinformasi Pemerintah dengan Kepatuhan Masyarakat. Hubungan ini ada dalam derajat sedang ($r = 0,40-0,60$) dan arahnya positif. Hubungan kedua variabel ini sebenarnya diharapkan negatif, tetapi menurut data penelitian masih positif. Karena hubungan ini positif, berarti semakin tinggi disinformasi pemerintah, masih meningkatkan juga kepatuhan masyarakat terhadap disinformasi itu. Hal ini mungkin terjadi karena menyangkut atau terkait nyawa manusia. Dengan sendirinya kendati ada disinformasi dari pemerintah, masyarakat tetap patuh dalam rangka menyelamatkan nyawanya.

Analisis Korelasi Chi-Square

Dengan data nominal yang ada, yakni menghitung frekuensi dari variabel penelitian, maka hasil korelasi chi-square memberikan sedikit hasil yang signifikan seperti berikut. Dari sekian banyak kombinasi yang ada antara latar belakang responden dengan ke 17 item pernyataan, hanya terdapat satu hubungan di dalamnya, yakni adanya hubungan antara jenis kelamin terhadap persetujuan terhadap pernyataan pada butir nomor 17. Dalam menanggapi disinformasi pemerintah pada butir nomor 17 yaitu: "Menteri Kesehatan mewacanakan sertifikat vaksin Covid-19 digunakan sebagai syarat untuk melakukan perjalanan. Artinya, masyarakat tidak perlu lagi menunjukkan bukti negatif tes Covid-19 jika sudah disuntik vaksin", didapat perbedaan sikap antara laki-laki dan perempuan.

Tabel kontingensi menurut Jenis kelamin terhadap tingkat persetujuannya, di mana persetujuannya dari lima tingkat dibuat jadi dua. Jawaban Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju sampai Kurang Setuju dibuat jadi satu kelompok, juga jawaban Setuju sampai Sangat Setuju dibuat satu kelompok. Sehingga didapat tabel frekuensi kontingensinya seperti berikut.

Jenis Kelamin * X17 Crosstabulation				
Count		X17		Total
		1	2	
Jenis Kelamin	Laki-laki	18	29	47
	Perempuan	43	33	76
Total		61	62	123

Dalam hal ini, tingkatan jawaban responden dikelompokkan jadi dua kelompok saja untuk membantu kelayakan perhitungan. Jawaban Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju sampai Kurang setuju dibuat satu kelompok (diberi kode 1), dan pilihan jawaban setuju sampai sangat setuju dikelompokkan jadi satu (diberi kode 2).

Hasil nilai Chi-Square hitung (X^2) pada tabel di bawah ini didapat sebesar 3,882. Karena nilai Sig dari data observasi ada sebesar 0,049 di mana nilai ini lebih kecil dari alpha 0,05 maka dengan demikian terdapat hubungan antara jenis kelamin peserta dengan tingkat jawaban mereka yang diberikan. Artinya antara jenis kelamin dan jawaban mereka tidak saling bebas. Dalam hal ini perempuan lebih menyatakan disinformasi butir nomor 17 dalam kategori Sangat tidak setuju, tidak setuju sampai kurang setuju, dibanding laki-laki yang lebih menjawab ke tingkat setuju sampai sangat setuju.

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	3.882 ^a	1	.049		
Continuity Correction ^b	3.186	1	.074		
Likelihood Ratio	3.910	1	.048		
Fisher's Exact Test				.064	.037
N of Valid Cases	123				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23.31.
b. Computed only for a 2x2 table

Simpulan

Pada penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif di antara disinformasi pemerintah dengan kepatuhan masyarakat dalam masa pandemi covid 19. Serta kendati pemerintah telah ada dalam posisi menyampaikan disinformasi, masyarakat masih tetap menanggapinya positif. Bisa saja karena hal-hal dimaksud itu berkaitan dengan nyawa, kesehatan atau kelanjutan hidupnya dan juga tingkat pengetahuan masyarakat. Sehingga terdapat perbedaan kepatuhan responden menurut jenis kelamin dalam memberi respon kepada pemerintah tentang pernyataan sertifikat vaksin sebagai jaminan untuk bepergian. Rekomendasi dari penelitian ini agar pemerintah sebagai komunikator yang kompeten dan kredibel konsisten dalam menyampaikan informasi yang benar bukan disinformasi karena komunikasi bersifat irreversible yang berdampak kepada kepatuhan masyarakat dalam menjalankan aturan dan kebijakan dari pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Covid-19.

Referensi

- Armstrong, G., Adam, S., Denize, S., & Kotler, P. (2014). Principles of marketing. Pearson Australia.
- Bafadhal, O. M., & Santoso, A. D. (2020). Memetakan pesan hoaks berita COVID-19 di Indonesia lintas kategori, sumber, dan jenis disinformasi. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(02), 235–249.
- Fajar, J. (2020). Krisis komunikasi dalam pandemi Covid-19. *Buku Litera*.
- Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Untuk Pemulasaran jenazah,
- Kriyantono, R. (2017). Teori-teori public relations perspektif barat & lokal: Aplikasi penelitian & praktik. Kencana.
- Kusumastuti, F., Astuti, S. I., Astuti, Y. D., Birowo, M. A., Hartanti, L. E. P., Amanda, N. M. R., & Kurnia, N. (2021). Modul Etis Bermedia Digital.
- Mauludi, S. (2019). Seri cerdas hukum: Awass hoax! cerdas menghadapi pencemaran nama Bbaik, ujaran kebencian & hoax. *Elex Media Komputindo*.
- Nelakurthi, A. R., & He, J. (2020). Social Media Analytics for User Behavior Modeling: A Task

- Heterogeneity Perspective. CRC Press.
- Prasetyo, C. (2017). *Bencana komunikasi*. Pranaya.
- Priatmojo. (2020). Positif terjangkau, Menhub budi karya pernah berkelakar soal kebal corona. Suara.Com. <https://www.suara.com/jogja/2020/03/14/212836/positif-terjangkit-menhub-budi-karya--pernah-berkelakar-soal-kebal--corona>.
- Sabilah, D., Puspanidra, T., & Martha, L. P. (2021). Analisis manajemen komunikasi diskominfo standi dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemkot bogor (studi kasus aplikasi si badra). *Jurnal Penelitian Sosial Ilmu Komunikasi*, 5(1), 46–55.
- Surahmat, A., Dida, S., & Zubair, F. (2021). Analysis of the Government's Crisis Communication Strategy Discourse to Defend Covid-19. *Jurnal Komunikasi*, 13(1), 36–53.
- Utami, R. A., Mose, R. E., & Martini, M. (2020). Pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di DKI Jakarta. *Jurnal Kesehatan Holistic*, 4(2), 68–77.
- Surat Edaran Nomor HK.02.02/1/385/2020 Tentang Penggunaan Masker Dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan pakai Sabun (CTPS) Untuk Mencegah Penularan Coronavirus Disease 19 (Covid-19)
- Surat edaran Kepala Satuan Tugas No, 13 Tahun 2021 Tentang Larangan Mudik Hari Raya Idul Fitri dan Pengendalian Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan `442H.